



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS
KESEHATAN)

UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG KEBIJAKAN DAN DATA KEPESERTAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNADI
2. Jabatan : DEPUTI DIREKSI BIDANG
3. NHK : 104383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.582.954.545

1. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/140 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 232.000.000
3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
5. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 438.954.545

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.033.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, VESPA PREMIERE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 6 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 152.682.229

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.819.136.774

III. HUTANG

Rp. 65.724.714

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.753.412.060

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.